

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 9, Oktober 2024, P. 694-704
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13910927>

Pemanfaatan Platform Instagram Sebagai Media Konstruksi Politik Identitas Calon Bupati Kabupaten Majalengka Pada Pilkada 2024

Shangra Mulalugina^{1*}

¹Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

*Email korespondensi: shangra21001@mail.unpad.ac.id

Abstract

This study aims to review the construction of identity politics of Majalengka Regency Regent Candidates in the 2024 Pilkada through the use of the Instagram platform based on the approaches of primordialism, constructivism, and instrumentalism. The results showed that Instagram has a strategic role in constructing the political identity of the two Candidates for Regent of Majalengka Regency in the 2024 Pilkada. Both Karna Sobahi and Eman Suherman display primordialism, constructivism and instrumentalism approaches through variously packaged content on their respective Instagram accounts.

Keyword: Identity Politics, Pilkada, Instagram

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau konstruksi politik identitas Calon Bupati Kabupaten Majalengka pada Pilkada 2024 melalui pemanfaatan platform Instagram berdasarkan pendekatan primordialisme, konstruktivisme, dan instrumentalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instagram memiliki peran strategis dalam mengkonstruksi politik identitas kedua Calon Bupati Kabupaten Majalengka pada Pilkada 2024. Baik Karna Sobahi maupun Eman Suherman, keduanya sama-sama menampilkan pendekatan primordialisme, konstruktivisme dan instrumentalisme melalui konten yang dikemas secara beragam pada akun Instagram masing-masing.

Kata kunci: Politik Identitas, Pilkada, Instagram

Article Info

Received date: 15 September 2024

Revised date: 25 September 2024

Accepted date: 05 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Ajegnya suatu negara diprakarsai oleh konsensus sekelompok orang (masyarakat) untuk mewujudkan kesejahteraan bersama atas dasar rasa senasib dan sepenanggungan. Kehidupan sosial yang saling bergantung di lingkungan masyarakat pada perkembangannya telah memantik kebutuhan akan lembaga pengatur sekaligus pengelola yang difungsikan untuk memenuhi ragam kebutuhan masyarakat. Pemerintah yang direpresentasikan sebagai “simbol” perwakilan rakyat dalam hal ini merupakan penanggung jawab atas jalannya proses kenegaraan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat demi mencapai taraf kesejahteraan tersebut. Pada praktiknya pengisi lembaga pemerintah atau pemegang jabatan pemerintahan merupakan para penguasa yang dipercayakan secara politis oleh masyarakat melalui proses pemilihan umum. Pemilihan umum atau Pemilu merupakan wujud penyelenggaraan demokrasi yang diagendakan secara berkala dalam rangka membentuk dan menentukan perwakilan kekuasaan sebagai perpanjangan tangan atas kedaulatan rakyat. Schumpeter menyatakan bahwa demokrasi merupakan “*comprising free competition among aspiring political leaders*” atau, demokrasi sebagai bentuk persaingan bebas di antara para calon pemimpin politik. Artinya, peran rakyat dalam demokrasi ialah berupa pemberian legitimasi kepada seorang penguasa atau sekelompok penguasa dalam “persaingan” tersebut yang kemenangannya ditentukan melalui pemilihan umum. Menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan diselenggarakannya pemilihan umum ialah untuk mewujudkan peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat, dan melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Sementara menurut Schumpeter, pemilihan umum berperan sebagai sarana untuk menghasilkan suatu pemerintahan atau

suatu badan penengah lainnya yang pada gilirannya menghasilkan suatu eksekutif nasional atau pemerintah. Kehidupan politik menjelang perhelatan pemilihan kepala daerah atau Pilkada sebagai salah satu wujud agenda pemilihan umum di Indonesia nampaknya semakin menggeliat, tidak terkecuali di Kabupaten Majalengka. Partai-partai mulai memanas-memaskan mesinnya dan para politisi berlomba-lomba menaiki *exposure* demi menggaet simpati rakyat. Berbagai strategi dilakukan, dimulai dari pencitraan melalui aksi sosial, menggiring *influencer* dan generasi muda untuk dijadikan sebagai *ambassador* politik, hingga membangun politik identitas sebagai bagian dari permainan agar kemenangannya dapat dilanggengkan.

Setiap individu dikaruniai oleh segenap kelebihan, kekurangan, maupun karakteristik tersendiri yang melekat sebagai identitas dirinya. Identitas merupakan pembeda sekaligus pengemuka ciri khas tiap individu yang dapat mencitrakan kepribadian atau memposisikan seseorang dalam lingkungannya. Secara praktis identitas kerap ditonjolkan sebagai alat dalam konteks politik dan cenderung dikonotasikan sebagai praktik kotor bak *money politic* atau *political manipulation*. Seperti halnya “mengidentifikasi” diri sebagai bagian dari suatu kelompok atau penggiat isu tertentu demi meraup suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilu, atau tujuan-tujuan politis lainnya. Politik identitas merupakan fenomena politik yang fokus terhadap perbedaan identitas dan pada konteks politik di Indonesia biasanya diidentikkan dengan keterwakilan elit dalam hal agama, etnisitas, kepentingan lokal atau ideologi dengan artikulasinya masing-masing. Secara teoritis politik identitas menurut Lukmantoro (dalam Nasrudin, 2018) adalah politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasis pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan. Sedangkan menurut Rile & Watson (dalam Harsono, 2023) politik identitas lebih memberi fokus kepada aktivitas seseorang dalam berpartisipasi untuk memobilisasi pengalaman, masalah politik, dan tujuan mereka berdasarkan nilai-nilai identitas kelompok.

Dalam format keetnisan, politik identitas tercermin mula dari upaya memasukan nilai-nilai kedalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, keinginan mendaratkan otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan separatis. Sementara dalam konteks keagamaan politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk menggejalanya perda syariah, maupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu. (Nasrudin, J., 2018)

Setidaknya terdapat tiga pendekatan dalam pembentukan identitas seseorang (termasuk dalam konteks politik identitas) menurut Widayanti (dalam Soenjoto, W., 2019), yaitu:

- a. Primordialisme. Identitas diperoleh secara alamiah, turun temurun. Dalam perspektif primordialisme identitas disadari secara objektif sebagai hal yang given dan lebih dipandang dari segi sosio-biologis (seperti ras, agama, gender, kewilayahan, atau kebudayaan) sehingga tidak dapat dibantah.
- b. Konstruktivisme. Identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat.
- c. Instrumentalisme. Identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan. Dalam pandangan instrumentalisme, identitas merupakan hal dinamis yang dapat dibentuk atau dirubah seiring dengan perkembangan atau perubahan wacana tertentu sehingga lebih menaruh perhatian pada proses manipulasi dan mobilisasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini telah mengakselerasikan perubahan yang signifikan bagi dunia politik. Keberadaan media media sosial sebagai platform daring yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan berkomunikasi secara virtual telah memfasilitasi kemudahan bagi aktor politik dalam memperkuat daya politiknya di hadapan publik. Terlebih dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Pasal 275 ayat 1 huruf e yang menjelaskan bahwa kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui media sosial, maka media sosial memiliki peran penting dalam memobilisasi partisipasi politik masyarakat Indonesia. Alternatif menguntungkan demikian kemudian dimanfaatkan oleh kandidat politik untuk mengemukakan politik identitas berikut mengkampanyekan gagasan politiknya, tidak terkecuali oleh kedua Calon Bupati dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kabupaten Majalengka yang memanfaatkan platform Instagram sebagai

media promosi politik. Instagram memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya menarik bagi berbagai kalangan, terutama dalam membangun personal branding (Prihatiningrum & Kusmiati, 2023).¹ Media sosial Instagram dapat mengubah lanskap politik, memberikan peluang baru untuk berkomunikasi langsung dengan pemilih. Instagram, dengan fokus pada konten visual (Musdalifah et al., 2022)², memungkinkan Calon Bupati untuk menarasikan kekuatan personal dan mengelaborasi keunggulan politiknya sehingga diasumsikan dapat menjadi sarana yang potensial dalam mengkonstruksikan politik identitasnya. Konstruksi politik identitas melalui pemanfaatan *platform* Instagram merupakan hal yang menarik untuk dikaji sebab setiap kandidat memiliki caranya tersendiri dalam mengkampanyekan kepentingan politiknya tersebut. Dengan demikian penelitian berjudul “Pemanfaatan *Platform* Instagram Sebagai Media Konstruksi Politik Identitas Calon Bupati Kabupaten Majalengka Pada Pilkada 2024” ini ditujukan guna menganalisis bagaimana pendekatan primordialisme, konstruktivisme dan instrumentalisme dilakukan oleh Calon Bupati melalui Instagram dalam rangka menarik simpati pendukung pada Pilkada Kabupaten Majalengka tahun 2024.

METODE

Metode penelitian sebagaimana didefinisikan oleh Sugiyono (2013) sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemanfaatan platform Instagram oleh Calon Bupati Kabupaten Majalengka sebagai media konstruksi politik identitas pada Pilkada tahun 2024 melalui metode penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2013) Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian berupa studi literatur atau studi kepustakaan yakni teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2003). Dengan demikian, data-data dalam penelitian ini diambil dari sumber dokumen tertulis relevan dari berbagai penelitian untuk menghasilkan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deklarasi Karna Sobahi dan Eman Suherman dalam pencalonan Bupati Kabupaten Majalengka tahun 2024-2029 pada Agustus 2024 lalu telah menyita atensi masyarakat Majalengka. Pasalnya kedua tokoh ini dahulunya merupakan “rekan seperjuangan” yang sama-sama membangun rumah tangga pemerintahan Kabupaten Majalengka pada periode sebelumnya, Karna Sobahi selaku mantan Bupati dan Eman Suherman selaku mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2019-2024. Perpecahan diantara keduanya dengan Karna menggiring Koko Suyoko dan Eman menggiring Dena M Ramdhan sebagai pasangan calon tentunya telah membagi masyarakat Majalengka ke dalam dua spektrum, ada yang menghendaki pergantian Bupati baru dan ada pula yang mengharapkan dua periode dari seorang Karna Sobahi. Hal ini sebagaimana terwakilkan dalam hasil survei Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka tahun 2024-2029 oleh Poltracking Indonesia (1-7 September 2024) dan Indikator (8-13 September 2024) yang diantaranya menunjukkan hasil sebagai berikut:

¹ Lubis, N., Sazali, H., Dianto, I., Rafiq, M., & Fikri, S. (2023). Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Pengembangan Identitas Politik Perempuan. *INTERAKSI PERADABAN: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 3(2).

² *Ibid.*



Gambar 1. Harapan Kepemimpinan Kabupaten Majalengka. Poltracking Indonesia, 2024. Diakses dari <https://heyzine.com/flip-book/5d75ed2726.html>.



Gambar 2 Simulasi 2 Nama Calon Bupati Majalengka. Poltracking Indonesia, 2024. Diakses dari <https://heyzine.com/flip-book/5d75ed2726.html>.

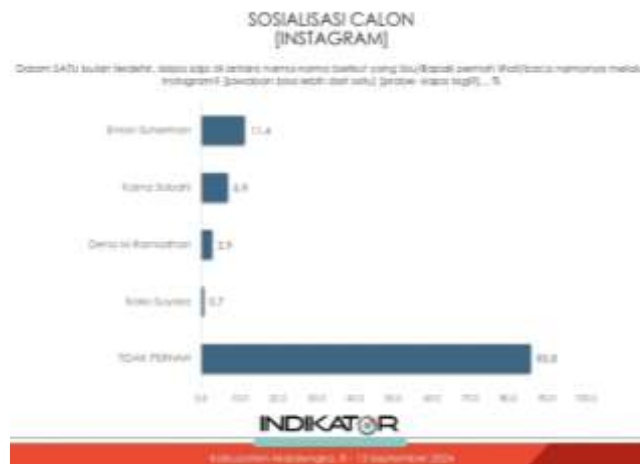


Gambar 3. Simulasi 2 Nama Calon. Indikator, 2024. Diakses dari <https://heyzine.com/flip-book/5833cb2405.html>.



Gambar 4. Alasan Memilih Calon Bupati. Indikator, 2024. Diakses dari <https://heyzine.com/flip-book/5833cb2405.html>.

Hasil survei tersebut tentunya bukanlah hasil mutlak dan sangat dinamis, gejala politik menjelang Pilkada pada November 2024 pun akan senantiasa terjadi. Pasca pendaftaran baik Karna maupun Eman keduanya berupaya menarik dukungan masyarakat Majalengka dengan berbagai strategi, tidak terkecuali menampilkan kiat politik identitas melalui media sosial Instagram.



Gambar 5. Sosialisasi Calon (Instagram). Indikator, 2024. Diakses dari <https://heyzine.com/flip-book/5833cb2405.html>.

Berdasarkan aktivitas kedua calon pada Instagram, diketahui bahwa keduanya melakukan siasat politik identitas dengan pendekatan primordialisme, konstruktivisme dan instrumentalisme:

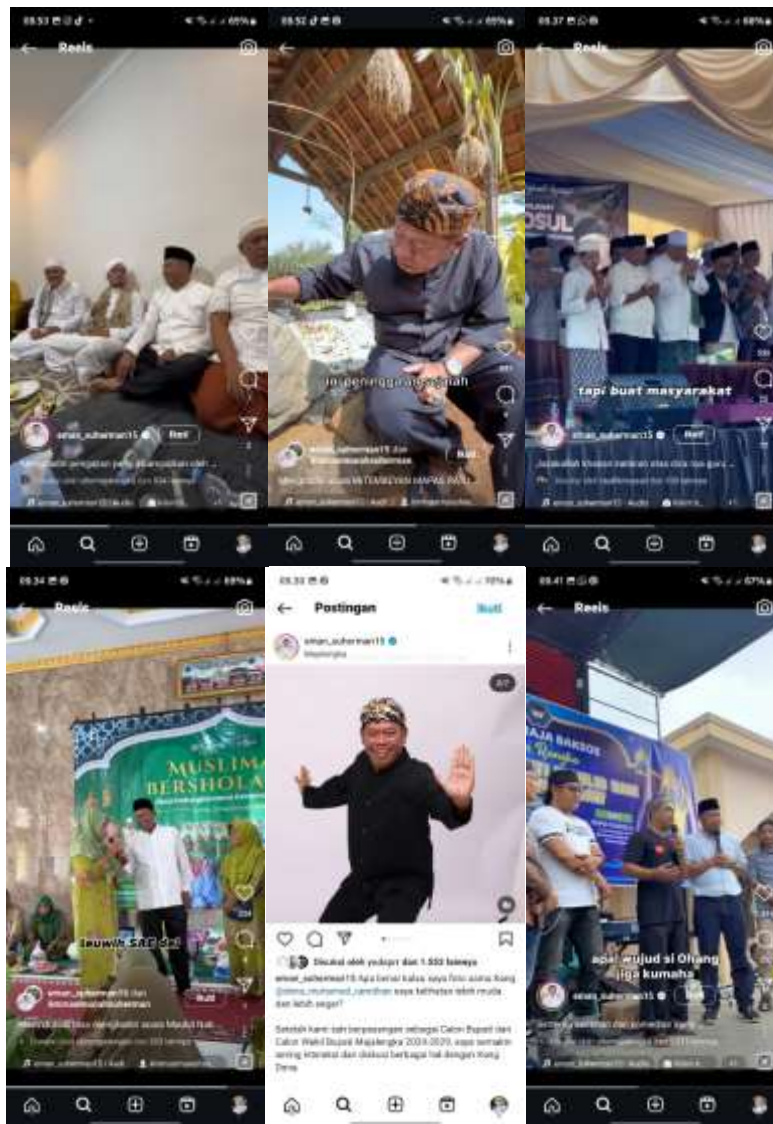
a. Primordialisme

Perspektif primordialisme memandang identitas sebagai suatu hal ilmiah atau pembawaan lahir, menyangkut faktor biologis dan ikatan emosional yang bersifat tetap dan tidak dapat dirubah. Primordialisme politik identitas melalui Instagram dapat ditampilkan melalui penggunaan simbol-simbol budaya atau agama yang kuat sebagai penegasan ikatan batiniah dan tradisional seseorang. Kedua Calon Bupati Kabupaten Majalengka tahun 2024-2029 sama-sama melakukan pendekatan primordialisme, Karna maupun Eman keduanya kerap membagikan postingan bernuansa keislaman maupun budaya Sunda sebagai representasi citra agamis dan sosok “putra daerah”. Karna Sobahi selain menjadi politisi, dirinya selama ini dikenal oleh masyarakat sebagai seorang kyai juga tokoh agama yang terlibat aktif dalam organisasi Persatuan Ummat Islam (PUI) sehingga menjelang Pilkada 2024 dirinya sering membagikan aktivitas keagamaan seperti mengisi majelis ta’lim atau menghadiri acara seremonial keagamaan.



Gambar 6. Aktivitas Keagamaan dalam Instagram @karna.sobahi

Eman juga nampak menunjukkan sisi primordialismenya melalui akun Instagram pribadinya, dirinya kerap membagikan momen bernuansa keagamaan seperti menghadiri acara sholawat, majelis ta’lim dan meminta do’a kepada ulama serta aktivitas yang lekat dengan budaya lokal seperti mengunjungi tempat bersejarah, meramaikan acara seremoni tradisional dan menghadirkan tokoh budaya.



Gambar 7. Aktivitas Keagamaan dan Budaya dalam Instagram @eman_suherman15

b. Kongsruktivisme

Konstruktivisme berargumen bahwa identitas politik merupakan hal yang dapat dirubah atau dikonstruksikan (dibangun) melalui pola interaksi sosial dan budaya. Instagram merupakan ruang yang dapat mengkonstruksikan politik identitas seseorang sebab melalui *platform* inilah identitas dapat dibentuk oleh narasi atau diskursus tertentu sebagaimana perkembangan tren atau algoritma massa pada media sosial. Sebagai *platform* visual, nstagram dapat dimanfaatkan oleh politisi sebagai wadah untuk membagikan konten *viral* berbasis kampanye, gerakan sosial, dan isu-isu politik melalui gambar, video, atau cerita yang dikuratori seperti penggunaan tema, warna, simbol atau tagar tertentu dalam postingan yang mencerminkan ciri khas atau posisi politik maupun sosialnya (dapat berupa akronim, slogan, nomor urut Pemilu, dan sebagainya). Pada konteks politik identitas, pendekatan konstruktivisme cenderung diidentikan dengan istilah “pencitraan”, sebab isu yang dikemas tidak jarang hanya bersifat formalitas (bukan benar-benar kebiasaan) atau sekedar menjadi bahan propaganda untuk menarik simpati pendukung, misalnya ketika suatu isu sedang ramai-ramainya diperbincangkan publik kemudian seorang politisi mendadak menjadi “ahli” dalam bahasan isu tersebut agar nampak sebagai bagian dari pengikutnya, padahal sebelumnya dirinya tidak pernah bersinggungan dengan isu tersebut. Menjelang Pilkada, kedua Calon Bupati Majalengka sama-sama melakukan pendekatan konstruktivisme melalui Instagram. Hal tersebut ditampilkan oleh Karna Sobahi melalui beberapa unggahan dialog dengan para petani di beberapa titik wilayah Majalengka untuk mengetahui permasalahan yang dihadapkan oleh petani sebagai tindak lanjut

atas isu pertanian yang selama ini digembor-gemborkannya. Kemudian Karna kerap melaksanakan bakti sosial dengan tetap menyelipkan sosialisasi program unggulannya dan dirinya juga sempat membagikan kegiatan kampanye terselubung melalui agenda *botram* (makan bersama) di rumah warga serta melakukan kunjungan nostalgia pada salah satu rumah tradisional di Padarek seakan berusaha mengidentifikasikan diri sebagai sosok yang sederhana.



Gambar 8. Konstruktivisme Politik Identitas dalam Instagram @karna.sobahi

Sama halnya seperti Karna, Eman Suherman juga melakukan pendekatan konstruktivismenya melalui Instagram dan bahkan terbilang lebih aktif dalam membagikan berbagai aktivitasnya jika dibandingkan dengan Karna. Berbeda dengan Karna yang lebih menguatkan sisi pembangunan pertanian, Eman lebih berfokus pada isu perekonomian (menyangkut masalah perdagangan dan ketenagakerjaan) dan kesetaraan gender, nampak dari seringnya melakukan kunjungan dan dialog bersama warga, pelaku UMKM, pedagang pasar, buruh, dan ibu-ibu. Cara Eman merepresentasikan dirinya pada saat kampanye cenderung lebih informal, seperti mengunggah konten memborong jualan warga lokal, mencicipi jajanan, menikmati hidangan di warung atau sekedar menceritakan kesehariannya seakan dirinya hendak menonjolkan diri sebagai pribadi yang “santai”. Eman juga sempat membagikan foto bersama Karna Sobahi selaku *rival* politiknya pasca mendaftarkan diri ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka, suatu hal yang tidak dilakukan oleh Karna namun dilakukan oleh Eman dalam rangka menjaga kondusifitas politik di tengah masyarakat yang “panas” menjelang Pilkada.



Gambar 9. Konstruktivisme Politik Identitas dalam Instagram @eman_suherman15

Selain itu, baik Karna maupun Eman dalam promosi politiknya melalui Instagram juga memanfaatkan penggunaan *tagline* dan tagar. Karna menggunakan slogan Mantap KK atau “Majalengka Tetap Karna Koko” dengan tagar #KKMembara sebagai akronim dari “Karna Koko Membangun Majalengka Bagja Raharja”, sementara Eman menggunakan *tagline*

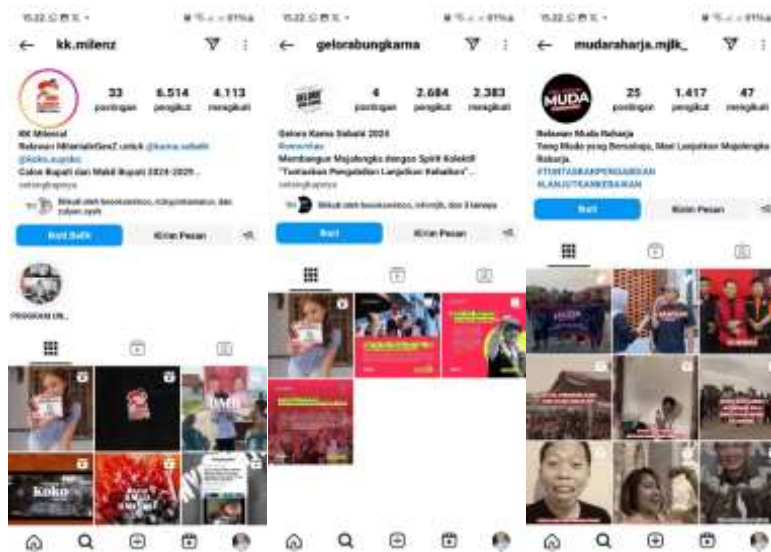
sekaligus tagar #LangkungSAE. *Langkung sae* merupakan Bahasa Sunda yang diterjemahkan sebagai “lebih baik” dalam bahasa Indonesia dan SAE pada tagar tersebut merujuk pada akronim ”Sahabat Akang Eman”.

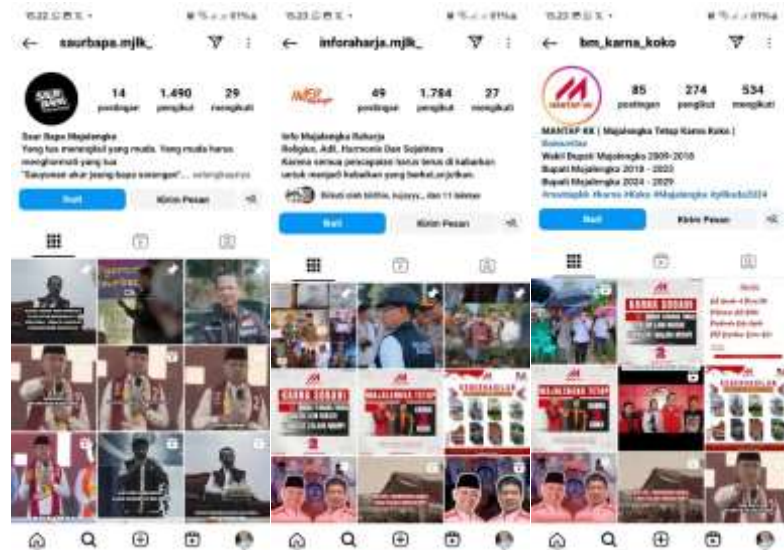


Gambar 10. Penggunaan Tagar dalam Instagram Karna dan Eman

c. Instrumentalisme

Berdasarkan kacamata instrumentalisme, identitas tidak dianggap sebagai hal alamiah dan tetap, melainkan sebagai hasil dari manipulasi guna meraup keuntungan dari tujuan tertentu seperti memobilisasi dukungan atau menaikkan popularitas. Pendekatan instrumentalisme politik identitas melalui Instagram dalam konteks Pilkada diantaranya dilakukan melalui kolaborasi dengan golongan tertentu atau pembuatan akun pemenangan khusus sebagai bagian dari upaya kampanye yang ditujukan guna menarik pengikut, membangun basis dukungan, atau mempromosikan program unggulan kandidat politik. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Karna Sobahi dan Eman Suherman menjelang Pilkada Kabupaten Majalengka tahun 2024, keduanya sama-sama berusaha menggaet generasi muda (Millennial dan Gen Z) sebagai bahan bakar pembangkit suara sekaligus bagian dari tim sukses serta membuat lebih dari satu akun kampanye. Karna dengan akun @kk.milenz, @gelorabungkarna, @mudaraharja.mjlk, @saurbapa.mjlk, @inforaharja.mjlk_ dan @bm_karna_koko, dan Eman dengan akun @relawan.gacoan, @relawansae99, @saekawan, @siberman.majalengka dan @kabarna.eman_.





Gambar 11. Akun Pemenangan Karna Sobahi



Gambar 12. Akun Pemenangan Eman Suherman

SIMPULAN

Peran Instagram sebagai *platform* media sosial sangatlah penting dalam menjembatani kampanye maupun memperkuat politik identitas Calon Bupati Kabupaten Majalengka pada Pilkada 2024. Baik Karna Sobahi maupun Eman Suherman, keduanya sama-sama menampilkan pendekatan primordialisme, konstruktivisme dan instrumentalisme melalui masing-masing akun Instagram. Pada pendekatan primordialisme, Karna jauh lebih massif dalam menunjukkan sisi agamisnya dibandingkan dengan Eman, namun Eman lebih sering menonjolkan identitas kebudayaannya dibandingkan dengan Karna. Kemudian dari segi konstruktivisme, keduanya terbilang aktif dalam menyalurkan visi, misi dan agenda politiknya melalui konten yang dikemas secara beragam, baik berupa dialog dengan warga maupun dalam bentuk *self branding*. Baik Karna maupun Eman memiliki fokus tersendiri yang diunggulkan pada gagasan politiknya dan keduanya sama-sama berusaha mengidentifikasi diri sebagai sosok yang merakyat dengan melakukan pendekatan intens kepada masyarakat. Sementara berdasarkan perspektif instrumentalisme, politik identitas Karna dan Eman melalui Instagram dapat dikatakan sama yakni dengan berusaha menggaet entitas pemuda dan menghadirkan akun khusus pemenang sebagai alat kampanye dalam memantik basis dukungan.

Kendati sejauh ini persaingan diantara kedua Calon Bupati Kabupaten Majalengka tahun 2024-2029 terbilang cukup kondusif, namun keberadaan politik identitas baik secara langsung maupun tidak langsung tetap harus dikawal dengan serius oleh seluruh elemen masyarakat agar tidak menimbulkan polarisasi politik yang memecah belah. Selain harus bijak dalam memilih pun memilah informasi berkenaan dengan kedua kandidat, masyarakat terutama generasi muda perlu dibekali oleh penguatan basis pendidikan politik agar tidak mudah terbawa oleh arus intrik politik yang picik sepanjang Pilkada. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka selaku lembaga yang berwenang dalam perhelatan Pilkada juga perlu menjadi ruang aman terpercaya yang mampu menjaga semangat persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat dengan perpedaan preferensi pilihannya. Terakhir, bagi kedua kandidat yang berkontestasi, idealisme dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau “bekerja untuk rakyat” harus dijadikan sebagai landasan dalam berpikir maupun bertindak agar strategi politik identitas yang dilakukan tidak berakhir menjadi hal destruktif seperti menimbulkan pertentangan SARA, perpecahan atau eksploitasi isu berlebihan sehingga sekalipun keberadaan Instagram dapat menjembatani konstruksi politik identitas, namun tetap harus dimanfaatkan secara bijak atau sewajarnya saja dan baiknya lebih memperkaya dukungan politik melalui aksi nyata dengan banyak melibatkan aktor-aktor *grassroot*.

REFERENSI

- Al-Farisi, L. S. (2020). Politik Identitas: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam Negara Pancasila. *Aspirasi*, 10(2), 77-90.
- Ardha, B. (2014). Social Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 di Indonesia. *Jurnal Visi Komunikasi*, 13(1), 105-120.
- Harsono, H. (2023). Politik Identitas dan Partisipasi Politik di Media Sosial: Analisis Model Struktural Pada Generasi Z di Kota Malang. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(2), 166-187.
- Kingsbury, D. (2007). *Political Development*. Rotledge.
- Lubis, N., Sazali, H., Dianto, I., Rafiq, M., & Fikri, S. (2023). Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Pengembangan Identitas Politik Perempuan. *INTERAKSI PERADABAN: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 3(2).
- Nasrudin, J. (2018). Politik Identitas dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1), 34-47.
- Nazir, M. (2003). Metode Penelitian. *Jakarta: Ghalia Indonesia*.
- Sadar Alam, H. (2024). Eksistensi Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara (Doctoral dissertation, IPDN).
- Soenjoto, W. P. P. (2019). Eksploitasi Isu Politik Identitas Terhadap Identitas Politik Pada Generasi Milenial Indonesia di Era 4.0. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(2), 187-217.
- Sugiyono, D. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.